PENYIMPANGAN SOSIAL PEDOFILIA

(UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA
Lingkup Hak Cipta

Pasal 1 Ayat 1 :

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana:

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Siti Nurbayani

PENYIMPANGAN SOSIAL PEDOFILIA

(UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN)

Diterbitkan Oleh

PENYIMPANGAN SOSIAL PEDOFILIA
(UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN)

Penulis : Siti Nurbayani
Editor : Moh. Dede
Penyelaras Aksara : Nurrahmawati
Tata Letak : Ridwan Nur M
Desain Cover : Bintang W Putra

Penerbit:

Bintang Pustaka Madani

(CV. Bintang Surya Madani)

Anggota IKAPI Nomor: 130/DIY/2020

Jl. Wonosari Km 8.5, Dukuh Gandu Rt. 05, Rw. 08

Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta 57773

Telp: 4358369. Hp: 085865342317

Email: redaksibintangpustaka@gmail.com

Facebook: Penerbit Bintang Madani

Instagram: @bintangpustaka

Website: www.bintangpustaka.com

www.pustakabintangmadani.com

Cetakan Pertama, April 2021

Bintang Pustaka Madani Yogyakarta

ix + 146 hal : 15.5 x 23 cm

ISBN :

Dicetak Oleh:

Percetakan Bintang 085865342319

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Gambar pada sampul depan : https://media.newstracklive.com/uploads/other-news/crime-news/Jan/29/big_thumb/1_5e31231be2e30.JPG

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan buku ini. Salawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Saw yang telah memberikan kita jalan untuk menuju kebahagiaan hakiki. Buku yang penulis beri judul *Penyimpangan Sosial Pedofilia (Upaya Pencegahan dan Penanganan)* merupakan referensi bagi pembaca yang ingin memahami fenomena pedofilia sebagai kajian keilmuan, bagi peminat ilmu-ilmu sosial, sekaligus dalam tatanan praktis, yakni turut mengupayakan pencegahan dan penanganannya di tengah masyarakat.

Sejak lima tahun terakhir, penulis peduli dan tertarik untuk mendalami kasus pedofilia yang menimpa anak-anak di Indonesia. Hal tersebut penulis wujudkan melalui penelitian berseri yang berlokasi di lingkungan sosial, di mana kejadian memilukan itu pernah berlangsung. Fakta bahwa pelaku pedofilia berasal dari sekitar kita benar adanya. Karena umumnya mereka dikenal baik oleh anak, orang tua, serta para tetangga. Kasus pedofilia layaknya fenomena gunung es, pengungkapan sangat bergantung pada pelaporan korban ke pihak kepolisian yang tak jarang berujung pada ‘proses damai’. Pedofilia sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial memerlukan perhatian bersama karena merugikan perkembangan fisik dan mental korbannya. Tanpa penanganan yang memadai, korban pedofilia

dapat menjadi pelaku kekerasan seksual serupa layaknya sebuah ‘siklus sosial’ yang mengancam kehidupan anak-anak.

Buku ini merupakan produk akhir penelitian unggulan perguruan tinggi yang bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis permasalahan pedofilia yang terjadi di Indonesia sebagai landasan utama penulisan. Terlebih saat ini, pedofilia terus menjadi perdebatan masyarakat karena ada sebagian golongan yang menganggapnya hanya sebagai orientasi seksual semata. Selain berfokus pada korban, buku ini juga membahas bahwa kasus pedofilia memerlukan beragam pendekatan yang menysasar keluarga, lingkungan sekitar, dan pelaku itu sendiri sebagai satu kesatuan. Upaya tersebut penulis sajikan dengan menawarkan sebuah gerakan sosial yang dapat diimplementasikan secara aktif melalui kerja sama masyarakat, kepolisian, dan pemerintah setempat.

Penulis membagi buku ini ke dalam 6 (enam) bab yang dimulai dari *Penyimpangan Sosial, Mengenal Pedofilia, Pedofilia di Indonesia, Penanganan Kasus Pedofilia Melalui Gerakan Sosial, Penguatan Sinergi Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Membentuk Individu*, serta *Penutup*. Tiap bab telah penulis susun secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami pedofilia. Buku ini memiliki ciri khas utama pada Bab karena menyajikan model gerakan sosial yang disertai dengan penjelasan dan gambar diagram alir yang berasal dari pengalaman penulis melakukan kajian mendalam di Garut, Sukabumi, dan Tangerang sebagai lokasi kejadian pedofilia yang pernah membuat heboh publik tanah air. Model gerakan sosial ini penulis beri nama *Model Peduli Anak Bangsa* yang terbagi atas *Model Peduli Utama (Delima)*, *Model Peduli Sosial (Delisa)*, serta *Model Peduli Korban (Delian)*.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam memberikan dukungan dan kontribusi berharga dalam penyelesaian buku ini. Penulis juga

mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar karya ini dapat lebih baik ke depannya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Kota Bandung, 10 Februari 2021

Siti Nurbayani

Daftar isi

PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB 1

PENYIMPANGAN SOISAL	1
A. Perilaku Menyimpang	2
B. Ciri-Ciri Perilaku Menyimpang	7
C. Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Menyimpang.....	9
D. Jenis-Jenis Perilaku Menyimpang	11
E. Teori dan Tipologi Penyimpangan Sosial.....	15
F. Pengendalian Perilaku Menyimpang	21

BAB 2

MENGENAL PEDOFILIA	27
A. Kemunculan Istilah Pedofilia.....	28
B. Konsep Pedofilia.....	30
C. Faktor-Faktor Penyebab Pedofilia.....	32
D. Problem dan Dampak Pedofilia	35
E. Perkembangan Pedofilia.....	38
F. Pedofilia dan Predator Seksual.....	42

BAB 3

PEDOFILIA DI INDONESIA	49
-------------------------------------	-----------

A. Modus Pedofilia	50
B. Kasus Pedofilia di Indonesia.....	53
C. Penanganan Korban Pedofilia	59
D. Penanganan Pelaku Pedofilia	64

BAB 4

PENANGANAN KASUS PEDOFILIA MELALUI GERAKAN SOSIAL.....	75
A. Kelemahan Penanganan Kasus Pedofilia di Indonesia.....	76
B. Mencegah Anak menjadi Korban Pedofilia.....	78
C. Mengenal Gerakan Sosial.....	82
D. Gerakan Sosial untuk Penanganan dan Pencegahan Pedofilia	88

BAB 5

PENGUATAN SINERGI KELUARGA, SEKOLAH, DAN MASYARAKAT DALAM MEMBENTUK INDIVIDU.....	97
A. Peran Keluarga dalam Penanggulangan Pedofilia.....	100
B. Mengubah Paradigma dan Peran Masyarakat.....	107
C. Pengokohan Peran Pendidikan Formal dalam Penanganan Pedofilia	113
D. Model Peduli Anak Bangsa sebagai Sinergi Bersama.....	115

BAB 7

PENUTUP	133
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	137
TENTANG PENULIS.....	146

BAB 1

PENYIMPANGAN SOSIAL

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki dua sisi, yakni sebagai makhluk individual serta makhluk sosial. Sebagai makhluk individual, manusia bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri yang dalam konteks tertentu dapat terus bertahan hidup selama suplai kebutuhan primernya terpenuhi. Hal ini tentu berbeda dengan sisi manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia memerlukan kehadiran individu lain yang bersama-sama menghimpun masyarakat dan dalam perkembangan melahirkan dinamika perilaku, baik yang bersifat konstruktif maupun destruktif. Bila ditelaah lebih jauh, perilaku destruktif merupakan segala jenis tingkah laku manusia yang merugikan lingkungan sekitar dengan beragam bentuknya, seperti kekerasan, kejahatan, pencemaran nama baik, perlakuan buruk terhadap binatang, hingga pengrusakan lingkungan.

Dalam perkembangannya, penilaian manusia terhadap perilaku sesamanya terikat beragam nilai dan norma sosial yang pada kondisi tertentu justru dipengaruhi oleh tatanan kehidupan lokal. Meski

begitu, mayoritas penilaian tersebut juga berlaku secara universal dan berlaku selama sistem sosial masih lestari. Di sisi lain, perilaku destruktif bukan hanya terjadi akibat berkurangnya kesadaran atau kendali manusia atas tubuhnya, melainkan dapat pula dibentuk sebagai akibat dari pengaruh lingkungan sekitar hingga usaha-usaha untuk mempertahankan kehidupan dan perikehidupannya. Perilaku destruktif yang berkembang sangat dinamis di era peradaban global adalah perilaku menyimpang baik dari bentuk, kompleksitas, maupun intensitas kehadirannya yang bahkan beberapa di antaranya sulit terdeteksi apabila belum muncul pengakuan dan bukti dari pihak-pihak yang dirugikan.

A. Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang atau *deviant behavior* merupakan bagian dari masalah sosial yang terjadi tatkala individu maupun kelompok di dalam masyarakat melakukan tindakan (berekspresi) yang bertentangan dengan norma-norma yang telah melembaga di tengah masyarakat, baik secara sadar maupun tidak disadari oleh pelakunya. Perilaku menyimpang juga dapat dipahami sebagai *juvenile delinquency* yakni berupa segala tingkah laku, perbuatan, maupun tindakan asusila yang melanggar nilai-nilai moral, agama, serta ketentuan-ketentuan hukum di dalam masyarakat, sehingga merugikan orang lain dan diri sendiri (Mulyadi, 2018). Perilaku menyimpang berpotensi menjadi masalah bagi tegaknya sistem sosial, bahkan dalam intensitas tertentu mampu merubah paradigma dan norma-norma yang berlaku.

Santrock (2012) dan Sarwono (1997) telah merangkum beberapa pendapat ahli-ahli ilmu sosial dalam mendefinisikan perilaku menyimpang, antara lain:

1. James Vander Zanden

Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dinilai oleh mayoritas orang (publik) sebagai hal yang tercela dan telah

berada di luar batas toleransi.

2. Robert M.Z. Lawang

Perilaku menyimpang merupakan semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku di dalam sistem sosial serta menimbulkan usaha dari pihak berwenang dalam sistem itu untuk memperbaikinya.

3. Bruce J. Cohen

Perilaku menyimpang merupakan setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri (*social maladaptive*) dengan kehendak atau kelompok tertentu di dalam masyarakat.

4. Paul B. Horton

Perilaku menyimpang merupakan setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok (masyarakat).

5. M. Gold dan J. Petronio

Perilaku menyimpang adalah tindakan oleh seseorang yang sengaja melanggar norma-norma dan yang diketahui oleh dirinya sendiri bahwa jika perbuatannya berpotensi dikenai hukuman.

Dari pengertian beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang merupakan perilaku yang bermasalah, di mana terdapat batas-batasan tertentu yang dapat ditoleransi dan dimaafkan oleh masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu agar berubah-setelah pelaku diberikan peringatan, bila batasan tersebut terlewati, pelaku akan dikenakan hukuman atau sanksi sesuai kaidah yang berlaku. Perilaku bermasalah menjadi penyimpangan sosial tatkala mampu dan berpotensi merugikan diri sendiri dan masyarakat sekitarnya, sehingga memerlukan kontrol sosial untuk mencegah munculnya perilaku tersebut oleh masyarakat atau pihak-pihak yang berwenang.

Perilaku menyimpang telah menjadi studi yang menarik bagi para ahli ilmu-ilmu sosial. Menurut Henslin (2016), terdapat lima teori yang menjelaskan bagaimana perilaku menyimpang dapat terjadi di tengah masyarakat, yakni teori *differential association*, teori pelabelan (*labeling*), teori struktur sosial, teori fungsional, serta teori konflik.

1. Teori *Differential Association*

Menurut teori ini, perilaku menyimpang merupakan implikasi dari pola pergaulan yang berbeda. Perilaku menyimpang terjadi melalui proses-proses alih budaya (*cultural transformation*), di mana seseorang telah dan sedang mempelajari suatu budaya menyimpang, seperti perilaku homoseksual, hubungan seks pranikah, dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini biasanya dapat terjadi pada setiap manusia dan tanpa memandang beragam latar belakang sosialnya, baik itu pendidikan, keturunan, agama/kepercayaan, maupun budaya asalnya.

2. Teori Pelabelan (*Labeling*)

Menurut teori ini, individu maupun kelompok melakukan perilaku menyimpang akibat proses *labeling*. Label merupakan atribut yang melekat dengan individu ataupun kelompok yang dapat berupa julukan, cap, etiket, dan merek yang diberikan oleh masyarakat, sehingga atribut tersebut mengalami internalisasi dan menjadi dalih untuk melakukan perilaku menyimpang.

3. Teori Struktur Sosial

Teori ini dikemukakan oleh Robert K. Merton. Menurutinya, perilaku menyimpang berasal dari struktur sosial yang berpotensi menghasilkan perilaku konformis, di mana perilaku menyimpang merupakan bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu.

4. Teori Fungsional

Emile Durkheim berpendapat bahwa kesadaran moral semua

anggota masyarakat tidak mungkin terjadi, karena setiap individu itu unik dan memiliki perbedaan karakter akibat faktor keturunan, lingkungan fisik, maupun lingkungan sosialnya. Hal ini memberikan sebuah konsekuensi bagi sistem sosial, karena perilaku menyimpang dapat dipastikan akan selalu ada dan merupakan keperluan yang nyata bagi tatanan sosial agar moralitas, norma, dan hukum berkembang terus secara formal.

5. Teori Konflik

Teori ini dicetuskan oleh Karl Marx yang dilatarbelakangi oleh stereotipnya terhadap kapitalisme yang berkembang pesat di Barat pasca revolusi industri. Menurut teori ini, perilaku menyimpang hanya muncul dalam pandangan kelas yang berkuasa (*bourgeois*) untuk melindungi kepentingan dan modal mereka. Marx menyatakan bahwa perilaku menyimpang dapat berkembang dan berkembang sebagai tindak pidana tatkala dilakukan oleh golongan-golongan lemah (*proletar*).

Penyimpangan sebagai suatu fenomena sosial memicu munculnya seperangkat interpretasi dan reaksi sosial di tengah masyarakat. Aspek sosial perilaku menyimpang akan menjadi semakin jelas tatkala mampu memengaruhi orang atau kelompok lain untuk menilainya sebagai tindakan yang layak dilakukan, sehingga mereka akan turut berperilaku menyimpang (*deviant*) (Siahaan, 2010). Perilaku menyimpang yang diduga sebagai pelanggaran atas norma-norma sosial, terbagi ke dalam dua pandangan, yakni:

1. Pandangan pertama memandang perilaku menyimpang sebagai pemberian objektif (*objectively given*). Para ahli ilmu sosial memandang perilaku menyimpang secara objektif, mempelajari dan menganggapnya hanya sebatas penyimpangan norma-norma sosial. Hal tersebut dilandasi atas tiga asumsi, di antaranya:

- a. Terdapat kesepakatan yang meluas (*widespread consensus*) di tengah masyarakat yang menyusun norma-norma sosial. Kesepakatan ini dalam konteks relatif dapat memudahkan individu atau kelompok untuk mengidentifikasi penyimpangan.
 - b. Penyimpangan dapat menimbulkan sanksi negatif seperti gunjingan hingga tindakan hukum.
 - c. Pemberian hukuman akan semakin memperkuat pemahaman tentang perilaku menyimpang di tengah masyarakat. Pendekatan ini memberikan kejelasan dan kemudahan dalam mengikuti asumsi-asumsi tersebut. Namun sifat, penyebab, serta konsekuensi penyimpangan tidak mudah untuk diidentifikasi.
2. Pendekatan kedua menganggap penyimpangan sebagai permasalahan yang subjektif. Para ahli menekankan pada diferensiasi sosial dari para pelaku penyimpangan, sehingga membentuk beberapa asumsi lainnya sebagai berikut:
 - a. Ketika individu maupun kelompok berinteraksi terhadap pihak lain merupakan wujud dari pembagian simbol (*shared symbols*), seperti bahasa verbal, bahasa tubuh, gaya berpakaian, dan lain sebagainya. Melalui komunikasi simbolik tersebut, manusia dapat saling memberi tipe dan merumuskan tindakan yang sesuai dengan hal tersebut.
 - b. Penyimpangan dapat dipahami sebagai suatu proses ini, di mana label terhadap pelakunya merupakan simbol yang membedakan dirinya dengan orang lain dan memicu munculnya stigma.
 - c. Manusia bertindak berdasarkan label sehingga dia merasa dirinya berbeda dari orang lain dan dapat bereaksi sesuai dengan penilaian label tersebut.

Kedua perspektif sebetulnya pada definisi sosial atas perilaku menyimpang dan pengaruhnya di dalam interaksi sosial. Pendekatan pemberian objektif menekankan pada karakteristik pelaku dan kondisi yang mendukung perkembangannya, sedangkan pendekatan permasalahan subjektif lebih menekankan perilaku penyimpangan itu sendiri yang memicu kemunculan label, serta pengaruh interaksi keduanya.

B. Ciri-Ciri Perilaku Menyimpang

Sistem sosial terbentuk akibat konsensus bersama demi mencapai tujuan hidup kelompok atau masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai bentuk pelanggaran dan mengancam tujuan tersebut muncul akibat dipengaruhi oleh beragam faktor. Meski begitu, suatu perilaku dapat dinilai sebagai penyimpangan ataupun *on the track* karena memiliki sejumlah ciri. Menurut Paul B. Horton, perilaku menyimpang dapat dikenali melalui ciri-ciri sebagai berikut:

1. Penyimpangan harus dapat didefinisikan. Perilaku dinyatakan menyimpang harus dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu dan diketahui penyebabnya.
2. Penyimpangan memiliki dua konsekuensi, yakni diterima maupun ditolak. Perilaku menyimpang tidak selamanya bersifat negatif dan berlaku secara universal. Pada kasus tertentu, seperti wanita karier dapat diterima oleh masyarakat luas — setelah terjadinya gelombang emansipasi. Di sisi lain, perilaku menyimpang juga tidak mampu diterima oleh masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, dan beragam bentuk kejahatan pidana lain, baik itu kerah biru (*blue collar crime*) maupun kerah putih (*white collar crime*).
3. Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Sudah menjadi keniscayaan bahwa semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan, meskipun dalam beberapa kasus hanya bersifat relatif dan terikat dengan kondisi tertentu. Relativitas

penyimpangan terjadi karena adanya perbedaannya dalam wujud frekuensi (intensitas) dan kadar penyimpangannya — biasanya tergantung status dan peranan sosial. Sementara penyimpangan mutlak berlaku tatkala telah atau berpotensi menghasilkan kerugian yang besar di dalam masyarakat. Pelaku yang telah melakukan penyimpangan mutlak harus berubah dan mau berkompromi dengan lingkungannya agar dia diterima kembali.

4. Penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Budaya ideal merupakan seperangkat peraturan norma dan hukum yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat. Walaupun pada kenyataannya, tidak ada individu yang mampu patuh terhadap seluruh peraturan tersebut, karena antara budaya nyata dengan budaya ideal akan selalu terjadi kesenjangan. Di sini, peraturan yang telah menjadi pengetahuan dan konsensus umum dalam praktik kehidupan sehari-hari akan selalu dilanggar, meskipun jumlah pelaku dan intensitas tindakan akan beragam.
5. Terdapat norma-norma penghindaran dalam suatu penyimpangan sosial. Norma penghindaran merupakan pola perbuatan yang dilakukan individu untuk memenuhi keinginan mereka dan tanpa harus menentang nilai-nilai secara terbuka. Norma penghindaran dapat dinyatakan sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang bersifat setengah melembaga.
6. Penyimpangan sosial bersifat adaptif (menyesuaikan). Penyimpangan sosial tidak selamanya akan menjadi ancaman bagi sistem sosial, karena dalam kondisi tertentu justru dianggap sebagai pembaru demi terciptanya stabilitas sosial. Penyimpangan sosial yang bersifat adaptif biasanya memiliki legitimasi dan argumentasi agar mampu diterima di tengah masyarakat atau kelompok.

C. Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Menyimpang

Sistem sosial terbentuk sebagai hasil interaksi dari manusia, kebudayaan, dan lingkungan sekitarnya. Perilaku menyimpang sebagai fenomena sosial merupakan bentuk dari perilaku manusia terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan yang dipengaruhi oleh beragam faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal. Perilaku menyimpang dapat terjadi secara sadar, karena pelaku menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan tatanan kehidupan sosial, tetapi terus dilakukan karena adanya dorongan atau hasrat yang tidak bisa dihindari. Di sisi lain, perilaku menyimpang juga bisa terjadi secara tidak sadar akibat ketidaktahuan pelaku maupun hilangnya kesadaran.

Burhanuddin (2011) membagi faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang atas dua jenis berdasarkan sumbernya, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal berasal dari dalam diri individu itu sendiri, baik itu yang bersifat fisik maupun psikis (mental). Beberapa faktor internal yang memengaruhi munculnya perilaku menyimpang, antara lain:
 - a. Kurangnya kontrol emosional;
 - b. Kelemahan untuk mengendalikan dorongan atau hasrat;
 - c. Gagap dalam menyikapi kegagalan prestasi sekolah, kerja, dan pergaulan;
 - d. Kurangnya rasa peka dan nurani.
2. Faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar individu. Lingkungan di sini dipahami sebagai aspek biogeofisik dan sosial-budaya. Beberapa faktor eksternal tersebut, terdiri atas:
 - a. Keluarga;
 - b. Teman pergaulan;

- c. Kelompok preferensi dan tokoh idola;
- d. Lingkungan pendidikan;
- e. Lingkungan dan budaya kerja;
- f. Masyarakat sekitar dan kebudayaan asal;
- g. Persaingan pemanfaatan sumber daya;
- h. Media massa dan media sosial.

Gambar 1.1. Posisi individu untuk melakukan perilaku menyimpang
(Sumber: Alam dan Ilyas, 2010)

Faktor internal penyebab perilaku menyimpang disebut pula (*inner containment*) yang timbul dari dalam diri pelaku itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yang memicu perilaku menyimpang (*outer containment*) timbul oleh pengaruh luar diri pelaku yang senantiasa dinamis, bahkan dapat di luar kendali dirinya (Alam dan Ilyas, 2010). Perilaku menyimpang juga dapat terjadi akibat lingkungan memberikan kesempatan untuk berperilaku. Lingkungan juga dipandang sebagai faktor potensial karena mengandung berbagai kemungkinan untuk memberikan pengaruh dan terwujudnya perilaku menyimpang sebagai akibat dari susunan (kombinasi) dan pembawaan lingkungan itu sendiri, baik yang bersifat tetap maupun sementara. Faktor lingkungan, seperti kependudukan,

mobilitas dan aksesibilitas, interaksi regional dan urbanisasi, *slump area*, serta kesejahteraan (ekonomi) masyarakat di suatu wilayah mampu memicu individu ataupun kelompok untuk melakukan tindakan menyimpang.

D. Jenis-Jenis Perilaku Menyimpang

Perilaku seseorang maupun kelompok dapat dinyatakan menyimpang apabila merugikan dirinya sendiri maupun orang lain yang biasanya mengacu pada seperangkat aturan (hukum), nilai, dan norma-norma tertentu. Perilaku menyimpang dapat digolongkan ke dalam jenis-jenis tertentu seperti sifat, pelaku, intensitas, dampak, serta bentuknya. Akan tetapi, bila mengacu pada kriteria dan sudut pandangnya, perilaku menyimpang dapat terbagi atas:

1. Berdasarkan jenisnya, perilaku menyimpang terdiri dari penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder.
 - a. Perilaku menyimpang primer merupakan tindakan penyimpangan yang pertama kali dilakukan oleh seseorang maupun kelompok.
 - b. Perilaku menyimpang sekunder merupakan pengulangan dari tindakan penyimpangan sebelumnya – lebih dari sekali.
2. Berdasarkan efek atau dampaknya, perilaku menyimpang dapat memiliki dampak positif maupun negatif.
 - a. Perilaku menyimpang positif ketika tindakan menyimpang membawa dampak positif bagi dirinya sendiri maupun orang lain–biasanya berupa inovasi atau kritik yang memberikan (meningkatkan) mutu kehidupan masyarakat.
 - b. Perilaku menyimpang negatif terjadi ketika tindakan penyimpangan memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Tindakan ini dinyatakan sebagai perilaku yang anti dan kontrasosial.

3. Berdasarkan bentuknya, perilaku menyimpang dapat menggolongkan pelakunya atas wujud pelanggarannya.
 - a. Perilaku menyimpang yang bukan tergolong dalam tindak kejahatan (kriminal), karena tidak disertai ancaman dan menimbulkan sanksi pidana.
 - b. Perilaku menyimpang yang tergolong dalam tindak kejahatan (kriminal) dan disertai dengan ancaman yang berpotensi pada sanksi pidana.
4. Berdasarkan pelakunya, perilaku menyimpang dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:
 - a. Penyimpangan individual (*individual deviation*) merupakan tindakan individu yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan. Penyimpangan ini dilakukan oleh individu yang bertindak sendiri dengan ataupun tanpa rencana untuk melaksanakan suatu kejahatan. Penyimpangan individual dapat terbagi atas lima tipe, yakni:
 - 1) Pembandel merupakan tindakan penyimpangan yang muncul karena seseorang tidak patuh pada nasihat orang tua ataupun lembaga agar berlaku baik.
 - 2) Pembangkang merupakan tindakan penyimpangan terjadi karena seseorang tidak taat pada peringatan orang lain di sekitarnya.
 - 3) Pelanggar merupakan tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang karena melanggar norma-norma umum yang berlaku di tengah masyarakat. Pelanggar dapat diartikan pula tidak taat terhadap peraturan yang tidak berujung pada pidana, misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas.
 - 4) Perusuh atau penjahat merupakan tindakan

penyimpangan yang mengabaikan norma-norma umum serta menimbulkan kerugian harta benda maupun jiwa di lingkungan kejadian perkara, seperti mencuri, menjambret, menodong, merampok, dan lain sebagainya.

- 5) Munafik merupakan tindakan penyimpangan dalam wujud tidak menepati janji, berkata bohong, berkhianat, dan berlagak membela.
- b. Penyimpangan berkelompok (*group deviation*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tunduk pada norma kelompok-kelompok, tetapi bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang memicu benturan sosial yang merugikan. Penyimpangan berkelompok biasanya membentuk suatu sindikat yang merugikan orang lain, seperti kartel narkoba, makelar penyelundup hewan-hewan yang dilindungi, serta jaringan perdagangan manusia antar wilayah-negara.
- c. Penyimpangan campuran (*combined deviation*) biasanya dilakukan oleh suatu golongan sosial yang memiliki organisasi yang rapi dan menyusup di dalam lembaga-lembaga yang dipandang tidak bermasalah bagi masyarakat, sehingga individu ataupun kelompok di dalamnya taat dan tunduk kepada kesepakatan yang sebetulnya adalah subkebudayaan menyimpang. Penyimpangan campuran misalnya terjadi ketika beberapa anggota suatu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang seharusnya menjadi wadah yang menguatkan sistem sosial justru melakukan aksi premanisme yang sebetulnya telah menyimpang dari norma-norma umum.

Menurut Sarwono, beberapa bentuk perilaku menyimpang dapat diidentifikasi berdasarkan pendekatan psikologi sosial. Hal ini disebabkan manusia akan memiliki kecenderungan untuk menutupi dan mencari pembenaran sebagai konsekuensi atas perilaku yang bertentangan dengan norma-norma di masyarakat, beberapa di antaranya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Reaksi hiperkinetik yang menyebabkan pelaku penyimpangan cenderung bersikap dan berperangai berlebihan terhadap suatu hal.
2. Menarik diri karena pelaku penyimpangan selalu menghindar dari kelompok masyarakat akibat telah dianggap berbeda.
3. Cemas berlebihan, pelaku akan selalu dilanda kecemasan atas sikapnya yang bertentangan dengan banyak orang dan menimbulkan kesan dirinya tidak akan diterima kembali.
4. Melarikan diri dan masuk ke dalam perkumpulan yang memiliki perilaku serupa. Fenomena ini terjadi ketika pelaku penyimpangan sudah tidak dipedulikan dan diremehkan oleh lingkungan sosialnya.
5. Agresi individual muncul ketika pelaku penyimpangan berperilaku agresif terhadap lawannya hingga berpotensi melakukan kekerasan fisik sebagai bentuk pelampiasan.
6. Menjadi pribadi jahat, pelaku penyimpangan dapat muncul ketika dirinya sudah tidak diberikan perhatian (afeksi) oleh lingkungan sekitarnya. Padahal dirinya memerlukan perhatian dari orang-orang di sekitarnya sebagai tempat berinteraksi. Kekurangan afeksi ini memicu munculnya sifat dan sikap jahat untuk melakukan perilaku menyimpang.
7. Melakukan tindakan kriminal dapat terjadi ketika individu terus berinteraksi dengan lingkungan yang buruk dan mendorong untuk melakukan perilaku negatif yang sebetulnya memiliki ancaman pidana, seperti mencuri, merampok, penyalahgunaan obat, berjudi, dan lain sebagainya.

8. Penyimpangan seksual terjadi ketika individu terpengaruh hal-hal negatif yang berkaitan dengan hasrat seksualnya. Penyimpangan seksual bisa dalam beragam wujud, seperti homoseksual, lesbian, biseksual, sadisme, transeksual, paedofilia, dan lain sebagainya.

Di dalam setting lingkungan dan kebudayaan tertentu, batas perihal perilaku menyimpang menjadi bias dan terus meluas. Di era dewasa ini, pemberian sanksi terhadap perilaku menyimpang dianggap sebagai tindakan kolot dan tidak *open-minded*. Padahal acuan untuk menilai suatu perilaku dapat dikatakan menyimpang maupun sebaliknya tetaplah ada dan terbagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Perilaku menyimpang yang bersifat amoral, asosial, dan tidak diatur dalam undang-undang (hukum formal), sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam bentuk pelanggaran hukum. Contoh dari perilaku ini misalnya berbohong, membolos, berpakaian tidak pantas, dan lain sebagainya.
2. Perilaku menyimpang yang bersifat melanggar hukum, sehingga memerlukan penyelesaian yang sesuai kaidah undang-undang ataupun peradilan. Perilaku menyimpang (*delinquency*) ini biasanya merupakan tindak pidana, seperti berjudi, membunuh, memperkosa, dan mencuri.

E. Teori dan Tipologi Penyimpangan Sosial

Pembentukan perilaku individu sangat bergantung pada lingkungan tempat ia dibesarkan. Jahja (2015) mengungkapkan bahwa belajar moral dan etika yang utama dapat berasal dari lingkungan sosial di sekitarnya. Meski begitu, tidak semua individu dapat menjadi pribadi yang menjaga dan mengamalkan nilai-nilai sosial akibat beragam sebab. Pelanggaran tersebut merupakan tergolong dalam penyimpangan sosial yang meresahkan masyarakat apabila dapat dikategorikan sebagai penyakit sosial (Nasution, 2019). Penyimpangan

sosial seakan telah menjadi keniscayaan di tengah masyarakat yang terdiri atas beragam individu beserta karakternya. Selain kompleks, perilaku menyimpang memuat nuansa relativitas untuk menentukan tipe dan derajat penyimpangannya (Widodo, 2020). Kompleksitas masalah perilaku menyimpang juga terkait dengan kaidah medis, hukum, dan isu-isu moral. Sementara itu, penyimpangan juga mengandung relativitas akibat adanya tinjauan dari beragam aspek seperti *cross-cultural perspectives, subcultural variations, ecological contexts, variation over time, situational deviance, audience, actor*, dan *situational* (Schur, 1989; Goode, 2016).

Pada dasarnya terdapat tiga perspektif untuk menentukan perilaku menyimpang, yakni *absolutist, normative*, dan *reactive*. Perspektif *absolutist* menyatakan bahwa karakteristik perilaku menyimpang bersifat instrinsik – terlepas dari bagaimana perilaku tersebut dinilai, sehingga penyimpangan ditentukan bukan karena norma, kebiasaan, maupun peraturan sosial. Hal tersebut berbeda dengan perspektif normatif (*normative*) yang menganggap penyimpangan sebagai perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu, karenanya sebuah tindakan dikatakan menyimpang sesuai batasan-batasan norma sosial (Cohen, 2013). Sementara dalam perspektif *reactive*, perilaku menyimpang dapat ditentukan secara aktual tatkala dinilai oleh pihak lain, baik dengan panca indra maupun bukti-bukti lainnya (*concrete social disapproval toward specific actions and actors*).

Dalam sudut pandang sosiologi, beragam teori sosial telah memberikan penjelasan untuk memahami perilaku menyimpang sebagai fenomena sosial. Emile Durkheim menjelaskan adanya kekosongan norma dan arah kehidupan sosial (*anomie*) akibat tidak selarasnya harapan kultural dengan kenyataan. Ahli lain, yakni Robert K. Merton pernah menghubungkan *anomie* dengan penyimpangan sosial, di mana proses sosialisasi yang seharusnya menjadikan

individu belajar mengenal beragam tujuan penting kebudayaan dan upaya mencapainya justru menimbulkan penyimpangan atau pencarian alternatif lain. Merton menyebutkan terdapat 4 (empat) perilaku menyimpang, yakni inovasi (*innovation*), ritualisme (*ritualism*), peneduhan diri (*retreatism*), dan pemberontakan (*rebellion*) (Suyato, 2005).

1. Terminologi inovasi dalam penyimpangan sosial berbeda dengan konsep umum, inovasi di sini merupakan perilaku seseorang yang menerima tujuan secara budaya tetapi menolak cara-cara yang diterima di tengah masyarakat. Inovasi sebagai penyimpangan sosial misalnya melakukan tindakan *bypass* yang sebetulnya melanggar norma, sehingga inovasi dalam penyimpangan sosial berkonotasi negatif, seperti main hakim sendiri, penyuapan, dan lain sebagainya.
2. Ritualisme terjadi tatkala seseorang menerima cara-cara yang diperkenankan secara kultural tetapi menolak tujuan kebudayaannya, misalnya pelajar yang mengikuti upacara hanya untuk mendapatkan imbalan dan terbebas dari hukuman yang semestinya dihayati sebagai seremonial untuk menghormati jasa para pahlawan.
3. Pengasingan diri (*retreatment*) ketika individu menolak baik cara-cara maupun tujuan yang diperkenankan secara budaya tanpa menggantinya berusaha untuk menggantinya.
4. Pemberontakan terjadi manakala individu menolak cara-cara maupun tujuan kultural serta berusaha menggantikannya dengan yang baru.

Selain keempat konsep tersebut, Merton juga mengutarakan konsep konformitas (*conformity*) sebagai cara adaptasi bagi individu tatkala ia diharuskan untuk mengikuti tujuan dan cara-cara kultural yang berlaku. Menurut Wirawan (2012), konsep tipologi adaptasi dari Merton juga memiliki tiga postulat untuk mendukungnya, yakni:

elemen-elemen sosial lainnya diharapkan mampu berperan mewujudkan tujuan mulia tersebut. Sinergi dalam penerapan model ini bukan hanya terpaku pada tujuan pragmatis sebagai respons sesaat terhadap kasus kekerasan, melainkan tujuan jangka panjang demi masa depan generasi penerus bangsa.

Salah satu tujuan disusunnya Model Peduli Anak Bangsa ini, yakni untuk melakukan transformasi pada individu korban pelecehan dan kekerasan seksual menjadi individu yang unggul dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, penerapan model ini secara optimal dan berkelanjutan dapat mendukung percepatan kemajuan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkualitas. Penerapan model ini dapat diawali dari upaya koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak pemrakarsa dan selanjutnya diteruskan untuk mengidentifikasi serta menjangkir keterlibatan beragam elemen masyarakat sebagai mitra strategis. Setelah kerja sama terbentuk, pegiat program untuk mengimplementasikan Model Peduli Anak Bangsa perlu menyusun tindakan perlindungan (preventif) maupun penanganan bagi korban kekerasan dengan mengutamakan prinsip hak anak.

Gambar 5.6 Alur Penerapan Model Peduli Anak Bangsa.

(Sumber: Analisis penulis, 2020)

Bila rancangan dan implementasi tindakan telah dilaksanakan, upaya selanjutnya adalah menjamin keberlanjutan pelaksanaannya di masa mendatang. Perlu komitmen bersama di antara elemen masyarakat dan pemangku kebijakan agar program ini tidak terbatas pada tanggapan sesaat atas kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak, melainkan menjadi upaya yang diprioritaskan dan ditetapkan sebagai program pemerintahan di tingkat lokal (desa/kelurahan) yang wajib diteruskan walau telah mengalami penggantian pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari membentuk habituasi masyarakat yang tanggap terhadap beragam kasus kekerasan terhadap anak-anak serta menghindari memunculkan kesempatan (peluang) bagi para pelaku.

Referensi

- Asean Post Team. 2020. Protecting Indonesia's Children. *The Asean Post*. Tersedia [daring] <https://theaseanpost.com/article/protecting-indonesias-children>. Diakses 15 Desember 2020.
- Chomaria, N. 2014. *Pelecehan Anak, Kenali dan Tangani! Menjaga Buah Hati dari Sindrom*. Solo: Tinta Medina.
- Cops, D. 2010. Socializing Into Fear: The Impact of Socializing Institutions on Adolescent's Fear of Crime. *Young: Nordic Journal of Youth Research*, 18, (4): 385-402.
- Dede, M., Sugandi, D. dan Setiawan, I. 2018. Pengaruh Kondisi Lingkungan Terhadap Kerawanan Kejahatan di Kawasan Perkotaan Studi Kasus di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. *Seminar Nasional Geomatika*, 3: 555-564.
- Dede, M., Sugandi, D. dan Setiawan, I. 2019. Interaksi Spasial Kondisi Sosial-Ekonomi terhadap Kerawanan Kejahatan di Kota Bandung (Studi Kasus Sumur Bandung). *Jambura Geoscience*

- Review*, 1 (2):, 40-49.
- Doran, B. J. dan Burgess, M. G. 2012. *Putting Fear of Crime on the Map: Investigating Perceptions of Crime Using Geographic Information Systems*. London: Springer.
- Duncan, K. A. 2005. *The Impact of Child Sexual Abuse on Parenting: A Female Perspective. Vistas: Compelling Perspectives on Counseling*. Alexandria, VA: American Counseling Association.
- Effendi, F. 2013. Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Kemandirian dalam Belajar Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bimbingan dan Konseling*, 1: 50-59.
- Elbadiansyah, U. 2014. *Interaksi Nasionalisme Simbolik dari Era Klasik Hingga Modern*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Fanetti, M., O'Donhue, W., Happel, R. F. dan Daly, K. 2015. *Understanding Pedophilia. In Forensic Child Psychology: Working in the Courts and Clinic*. New York: John Wiley and Sons.
- Handayani, T. dan Kurniawati, N. 2017. Fostering Community Awareness in Preventing and Handling Pedophilia. *Social Science, Education and Humanities Research*, 8: 1-4.
- Hardyns, W., Pauwels, L. J. R. dan Heylen, B. 2018. Within-Individual Change in Social Support, Perceived Collective Efficacy, Perceived Disorder and Fear of Crime: Results From A Two-Wave Panel Study. *The British Journal of Criminology*, 58 (5): 1254-1270.
- Hirschman, C. 2016. Gender, the Status of Women, and Family Structure in Malaysia. *Malaysian Journal of Economic Studies*, 53 (1): 33-50.
- Indrawati, E. dan Rahimi, S. 2019. Fungsi Keluarga dan Self Control Terhadap Kenakalan Remaja. *Ikraith-Humaniora*, 3 (2): 86-93.
- Jahnke, S. 2015. Understanding and Challenging Stigmatization of People with Pedophilia. *Disertasi*. Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften, Technischen Universität Dresden.
- Kear-Colwell, J. & Sawle, G. A. 2001. Coping Strategies and Attachment

- in Pedophiles: Implications for Treatment. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 45 (2): 171-182.
- Kenney, S. R. 2015. Pathways of Parenting Style on Adolescents' College Adjustment, Academic Achievement, and Alcohol Risk. *Journal of College Student Retention: Research, Theory and Practice*, 17 (2): 186-203.
- Khidir, S. 2019. Indonesia Must Protect Its Children. *The Asean Post*. Tersedia [daring] <https://theaseanpost.com/article/indonesia-must-protect-its-children>. Diakses 15 Desember 2020.
- Lalor, K. dan McElvaney, R. 2010. Child Sexual Abuse, Links to Later Sexual Exploitation/ High-Risk Sexual Behavior, and Prevention/ Treatment Programs. *Trauma, Violence and Abuse*, 11: 159-177.
- Landesman, T. 2008. Creating a World that Is Safe for Children. *Journal of Religion and Abuse*, 6 (3): 155-169.
- Levenson, J. S., Willis, G. M. dan Prescott, D. S. 2014. Adverse Childhood Experiences in the Lives of Male Sex Offenders: Implications for Trauma Informed Care. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 1-20.
- Malihah, E. dan Nurbayani, S. 2016. Pedophilia and the Lack of Social Control (a Case Study of Sudajaya). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Paris: Atlantis Press.
- Mendelson, T. dan Letourneau, E. J. 2015. Parent-Focused Prevention of Child Sexual Abuse. *Prevention Science*, 16 (6): 844-852.
- Nortajuddin, A. 2020. Sex Predators Thriving in a Pandemic. *The Asean Post*. Tersedia [daring] <https://theaseanpost.com/article/sex-predators-thriving-pandemic>. Diakses 15 Desember 2020.
- Nurbayani, S. 2020. Correlation of sosio-regional characteristics to women's and children's violence distribution in Indonesia. *Makalah pada the 4th International Geography Seminar 2020*, Bandung 30 September 2020.
- Parker, K. dan Wang, W. 2013. *Modern Parenthood: Roles of Moms and*

- Dads Converge as They Balance Work and Family*. Washington: Pew Research Center.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 1 Juni 1994. Jakarta.
- Quadara, A., Nagy, V., Higgins, D. dan Siegel, N. 2015. Conceptualising the Prevention of Child Sexual Abuse: Final Report. *Research Report No. 33*. Melbourne: Australian Institute of Family Studies.
- Raijaya, I. G. A. A. K. M. dan Sudibia, I. K. 2017. Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Terjadinya Kasus Pelecehan Seksual pada Anak di Kota Denpasar. *Piramida*, 13 (1): 9-17.
- Tarczon, C. 2012. *Mothers with a History of Childhood Sexual Abuse: Key Issues for Child Protection Practice and Policy (ACSSA Research Summary)*. Melbourne: Australian Institute of Family Studies.
- Theimer, K. dan Hansen, D. J. 2017. Attributions of Blame in a Hypothetical Child Sexual Abuse Case: Roles of Behavior Problems and Frequency of Abuse. *Journal of Interpersonal Violence*, 1-22.
- Toews, K., Cummings, J. A. dan Zagrodney, J. L. 2016. Mother Blame and the Just World Theory in Child Sexual Abuse Cases. *Journal of Interpersonal Violence*, 1-26.
- Viatric, D. I. 2015. Menilik Perasaan Terancam Bahaya Kejahatan Kriminal. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 3 (1): 121-131.
- Walker, A. K. D. dan MacPhee, D. 2011. How Home Gets to School: Parental Control Strategies Predict Children's School Readiness. *Early Childhood Research Quarterly*, 26 (3): 355-364.

BAB 6

PENUTUP

Pedofilia adalah perilaku menyimpang yang menargetkan anak-anak sebagai objek pelecehan dan kekerasan seksual. Fenomena tersebut memerlukan perhatian segenap elemen masyarakat untuk memutus rantai kasusnya karena kerap ditemukan pelaku pedofilia merupakan korban tindakan pelecehan seksual di masa lalu. Di Indonesia, kasus pedofilia yang memakan korban – beberapa konsep menyertakan pedofilia dapat dibatasi sebagai hasrat dan orientasi seksual individu semata – merupakan fenomena gunung es, di mana sebagian kasus justru tidak ditangani secara memadai dan diselesaikan melalui cara-cara kekeluargaan.

Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan lingkungan sosial yang ramah dan peduli bagi anak-anak. Beberapa sebab kasus-kasus pedofilia tidak terekspos dan dilaporkan pada pihak berwenang, meliputi kurangnya pendampingan hukum pada korban, intervensi (tekanan) sosial-ekonomi pelaku terhadap korban dan keluarganya, serta adanya penutupan kasus oleh pemerintah setempat (desa/

kelurahan). Selain itu, kasus pedofilia yang memakan korban anak-anak sering dianggap sebagai aib sosial bagi masyarakat setempat, padahal di sisi korban sangat membutuhkan perlindungan dan pengusutan secara mendalam. Tanpa adanya perlindungan, para korban pedofilia seakan dibiarkan dengan beragam trauma fisik, psikis, dan sosial. Penanganan kasus pedofilia yang tidak memadai justru hanya menguntungkan pelaku dan menimbulkan *victim-blaming* bagi korban maupun keluarganya. Selain merujuk ke korban, penanganan pedofilia memerlukan usaha untuk memulihkan pelaku agar mampu menjalani kembali kehidupan yang normal dan produktif di tengah masyarakat.

Tantangan lain dalam menanggulangi pedofilia terus bermunculan seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi. Ada sebagian pegiat hak asasi manusia (HAM) yang mendukung penghapusan pedofilia sebagai perilaku menyimpang dan mengubahnya hanya sebatas orientasi seksual semata, mereka menganggapnya sebagai bagian dari kebebasan individu layaknya fenomena LGBT yang sebetulnya juga menyimpang dari norma-norma di masyarakat. Selain berfokus pada penanganan korban, kasus pedofilia juga memerlukan penanganan yang memadai bagi orang dan keluarga korban — terutama ibu. Sosok ibu yang diberi tanggung jawab untuk mengasuh anak merasa dirinya gagal dan menyalahkan diri sendiri tatkala tidak mampu menjaga anaknya dari ancaman kekerasan seksual.

Pelecehan dan kekerasan seksual yang menargetkan anak-anak berkembang dalam masyarakat yang menganut pola asuh matrilineal dengan kecenderungan permisif. Kesibukan kedua orang tua sebagai pencari nafkah terbiasa untuk membiarkan anak-anak bergaul tanpa pengawasan memadai di lingkungan bermainnya. Hal ini berdampak pada hubungan orang tua dan anak menjadi kurang bersifat interpersonal (*intimate*) karena waktu interaksi di antara

mereka sangat kurang. Bila meninjau kasus pedofilia yang terjadi di Garut, Sukabumi, dan Tasikmalaya, orang tua dan masyarakat sekitar sangat percaya terhadap sosok pelaku yang dianggap sebagai pribadi ramah anak.

Pedofilia jangan hanya dipandang sebagai perilaku individu korban terhadap anak-anak secara langsung. Penetrasi teknologi digital yang membentuk ekosistem dunia maya turut menghadirkan kesempatan baru bagi para pengidap pedofilia melalui pembentukan komunitas di beragam *platform* jejaring sosial, *deep web*, hingga situs pornografi yang menghadirkan genre *lolly (underage)*. Pendeteksian pelaku sulit dilakukan karena pedofilia sebagai kelainan (gangguan) orientasi seksual kerap ditutupi oleh pelaku dengan menjalin hubungan dengan individu dewasa dan berkeluarga. Oleh sebab itu, penanggulangan pedofilia seharusnya tidak hanya berfokus pada pengungkapan pelaku, melainkan lebih mengarah pada upaya-upaya preventif yang dilakukan secara partisipatif layaknya sebuah gerakan sosial.

Gerakan sosial dinilai efektif untuk menanggulangi pedofilia karena berasal dari keresahan masyarakat itu sendiri. Untuk dapat mewujudkannya, gerakan sosial harus diejawantahkan dalam bentuk model yang mudah dipahami oleh para penggerak (pemrakarsa dan partisipan). Pada buku ini, upaya tersebut tercermin dari Model Peduli Anak Bangsa (MPAB) yang memuat tiga submodel turunannya, yakni Model Peduli Utama (Delima), Model Peduli Sosial (Delisa), serta Model Peduli Korban (Delian). MPAB menekankan pentingnya peran keluarga sebagai lingkungan sosialisasi primer bagi anak-anak, di mana penentuan dan pelaksanaan pola asuh tidak hanya dilakukan oleh sosok ibu. Di dalam Delima, komunikasi antara anak dan orang tua menjadi komponen fundamental untuk membangun tanggung jawab, pembagian peran, serta kontrol sosial yang dikenal sebagai ketahanan keluarga. Pembuktian MPAB sebagai gerakan sosial tersaji

dalam Delisa dan Delian. Delisa menghendaki masyarakat yang proaktif untuk mencegah tindak pelecehan dan kekerasan seksual melalui perubahan paradigma, peningkatan kepedulian sosial, serta keterlibatan anak-anak. Di dalam Delisa, tiap elemen masyarakat mempunyai kewajiban untuk menciptakan dan memelihara ketahanan sosial dalam bentuk setting sosial keguyuban.

Bila Delima dan Delisa berfokus pada upaya pencegahan, Delian merupakan upaya untuk memulihkan individu yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Delian memiliki tujuan utama, yakni membentuk anak-anak sebagai pribadi (individu) unggul di masa depan melalui *treatment* fisik, psikis, dan sosial yang memadai. Delian perlu melibatkan para ahli dan profesional untuk menangani trauma dalam diri korban yang didukung penuh oleh pemangku kebijakan, masyarakat, serta keluarga. MPAB memerlukan koordinasi dari tiap elemen masyarakat, termasuk peranan LSM atau NGO di bidang terkait. Koordinasi dilakukan mengacu pada prinsip-prinsip hak anak yang menjamin pelaksanaan model secara berkelanjutan dan membentuk habituasi di tengah masyarakat. Sebagai sebuah model, MPAB memiliki sejumlah tantangan untuk penerapannya yang terkait dengan komunikasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi antar elemen masyarakat. Meski begitu, upaya perlindungan bagi anak-anak agar terhindar dari kasus pelecehan dan kekerasan seksual harus terus menjadi kewajiban bersama sebagai bagian dari solidaritas antar generasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aberscrombie, N. 2010. *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akhdiat, H. dan Marliani, R. 2012. *Psikologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Alam, A. S. dan A. Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Anderson, B. J. 2007. *Secrets of Pedophilia in an American Religion (Jehovah's Witnesses in Crisis)*. Tennessee: Watchtower Documents.
- Anggraini, T., Riswandi dan Sofia, A. 2016. *Pendidikan Seksual Anak Usia Dini: Aku dan Diriku*. Tersedia [daring] <https://core.ac.uk/download/pdf/294953166.pdf>. Diakses 15 Desember 2020.
- Asean Post Team. 2020. Protecting Indonesia's Children. *The Asean Post*. Tersedia [daring] <https://theaseanpost.com/article/protecting-indonesias-children>. Diakses 15 Desember 2020.
- Brinkerhoff, D.B., White, L.K., Ortega, S.T. dan R. Weitz. 2011. *Essentials of Sociology*. Belmont: Wadsworth and Cengage Learning.
- Burhanuddin, N. 2011. *Al-Quran Mushaf al-Burhan*. Bandung: Media Fitrah Rabbani.
- Cahyono, H., Suhono, S. dan Khumairo, A. 2018. Pendidikan Karakter bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi dalam Mengatasi Amoral). *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*, 3 (1): 1-19.
- Chomaria, N. 2014. *Pelecehan Anak, Kenali dan Tangani! Menjaga Buah Hati dari Sindrom*. Solo: Tinta Medina.
- Chusna, P. A. 2017. Pengaruh Media Gadget pada Perkembangan Karakter Anak. *Dinamika Penelitian*, 17 (2): 315-330.
- Cohen, B. J. 2013. *Introduction to Sociology*. Texas: OpenStax College, Rice University.
- Cops, D. 2010. Socializing Into Fear: The Impact of Socializing

- Institutions on Adolescent's Fear of Crime. *Young: Nordic Journal of Youth Research*, 18, (4): 385-402.
- Dede, M., Sugandi, D. dan Setiawan, I. 2018. Pengaruh Kondisi Lingkungan Terhadap Kerawanan Kejahatan di Kawasan Perkotaan Studi Kasus di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. *Seminar Nasional Geomatika*, 3: 555-564.
- Dede, M., Sugandi, D. dan Setiawan, I. 2019. Interaksi Spasial Kondisi Sosial-Ekonomi terhadap Kerawanan Kejahatan di Kota Bandung (Studi Kasus Sumur Bandung). *Jambura Geoscience Review*, 1 (2):, 40-49.
- Doran, B. J. dan Burgess, M. G. 2012. *Putting Fear of Crime on the Map: Investigating Perceptions of Crime Using Geographic Information Systems*. London: Springer.
- Dove, S. W. 2002. *The Hidden Monster Pedophilia*. Bloomington: 1st Book Library.
- Duncan, K. A. 2005. *The Impact of Child Sexual Abuse on Parenting: A Female Perspective. Vistas: Compelling Perspectives on Counseling*. Alexandria, VA: American Counseling Association.
- Easton, S. D., Saltzman, L. Y., dan Willis, D. G. 2014. Would You Tell UnderCircumstances Like That? Barriers to Disclosure of Child Sexual Abuse for Men. *Psychology of Men and Masculinity*, 15 (4): 460-469.
- Efensi, S. (2016). Penanggulangan Kejahatan Pedofilia Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah (Studi Kasus di Kota Banda Aceh). *Tesis*. Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Effendi, F. 2013. Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Kemandirian dalam Belajar Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bimbingan dan Konseling*, 1: 50-59.
- Elbadiansyah, U. 2014. *Interaksi Nasionalisme Simbolik dari Era Klasik Hingga Modern*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Fanetti, M., O'Donhue, W., Happel, R. F. dan Daly, K. 2015.

- Understanding Pedophilia. In Forensic Child Psychology: Working in the Courts and Clinic.* New York: John Wiley and Sons.
- Goode, E. 2016. *Deviant Behavior.* New Jersey: Prentice Hall.
- Hagopian, J. 2019. *Pedophilia and Empire: Satan, Sodomy, and the Deep State.* Los Anglese: Pedoempire.org
- Handayani, P. K. 2010. Analisis Psikofenomenologi pada Narapidana Pelaku Pedofilia, Pendekatan Integratif: Studi Fenomenologi dan Analisis Klinis. *Disertasi.* Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada.
- Handayani, T. dan Kurniawati, N. 2017. Fostering Community Awareness in Preventing and Handling Pedophilia. *Social Science, Education and Humanities Research*, 8: 1-4.
- Hardyns, W., Pauwels, L. J. R. dan Heylen, B. 2018. Within-Individual Change in Social Support, Perceived Collective Efficacy, Perceived Disorder and Fear of Crime: Results From A Two-Wave Panel Study. *The British Journal of Criminology*, 58 (5): 1254-1270.
- Henslin, J. 2016. *Sociology: A Down to Earth Approach.* Edisi ke-16. New York: Pearson.
- Hertinjung, W. S. 2014. *The Dynamic of Causes of Child Sexual Abuse Based on Availability of Personal Space and Privacy.* Solo: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hirschman, C. 2016. Gender, the Status of Women, and Family Structure in Malaysia. *Malaysian Journal of Economic Studies*, 53 (1): 33-50.
- Indrawati, E. dan Rahimi, S. 2019. Fungsi Keluarga dan Self Control Terhadap Kenakalan Remaja. *Ikraith-Humaniora*, 3 (2): 86-93.
- Irmayanti, Y. 2018. *Peran Orangtua dalam Mendampingi Penggunaan Gawai pada Anak Usia Prasekolah.* Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Jahja, Y. 2015. *Psikologi Perkembangan.* Jakarta: Prenada Media Group.
- Jahnke, S. 2015. Understanding and Challenging Stigmatization of

- People with Pedophilia. *Disertasi*. Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften, Technischen Universität Dresden.
- Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. 2017. *Buku Kegiatan Perlindungan Terpadu Anak Berbasis Masyarakat (PATBM)*. Jakarta: KemenPPPA RI.
- Kenney, S. R.. 2015. Pathways of Parenting Style on Adolescents' College Adjustment, Academic Achievement, and Alcohol Risk. *Journal of College Student Retention: Research, Theory and Practice*, 17 (2): 186-203.
- Kershner, S. 2015. *Pedophilia and Adult-Child Sex: A Philosophical Analysis*. Maryland: Lexington Books.
- Khaidir, M. 2007. Penyimpangan Seks (Pedofilia). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1 (2): 83-89.
- Khidir, S. 2019. *Indonesia Must Protect Its Children*. Tersedia [daring] <https://theaseanpost.com/article/indonesia-must-protect-its-children>.
- Kirandita, P. 2017. Mengapa Kata “Lolly” dan “Candy” yang Dipilih Pedofil?. *Tirto.id*. Tersedia [daring] <https://tirto.id/mengapa-kata-lolly-dan-candy-yang-dipilih-pedofil-ck1l>. Diakses 15 Desember 2020.
- Koentjaningrat. 2013. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurniawan, D. dan Hidayati, F. 2017. Penyalahgunaan Seksual dengan Korban Anak-Anak (Studi Kualitatif Fenomenologi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Seksual dengan Korban Anak-Anak). *Jurnal Empati*, 6 (1): 120-127.
- Kurniawati, M. 2013. *Studi Kualitatif Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Pidie Tahun 2013*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Lalor, K. dan McElvaney, R. 2010. Child Sexual Abuse, Links to Later Sexual Exploitation/ High-Risk Sexual Behavior, and Prevention/Treatment Programs. *Trauma, Violence and Abuse*, 11: 159-177.
- Lamberg L. 2005. Researchers Seek Roots of Pedophilia. *American*

- Medical Association*, 294 (5): 546-547.
- Landesman, T. 2008. Creating a World that Is Safe for Children. *Journal of Religion and Abuse*, 6 (3): 155-169.
- Levenson, J. S., Willis, G. M. dan Prescott, D. S. 2014. Adverse Childhood Experiences in the Lives of Male Sex Offenders: Implications for Trauma Informed Care. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 1-20.
- Malihah, E. dan Nurbayani, S. 2016. Pedophilia and the Lack of Social Control (a Case Study of Sudajaya). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Paris: Atlantis Press.
- Mardiasih, K. 2020. *Ngeri Sekali jadi Korban Kekerasan Seksual di Negeri Ini, Minta Keadilan malah Mentok di Jalur Kekeluargaan*. Tersedia [daring] <https://mojok.co/kal/esai/ngeri-sekali-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-negeri-ini,-minta-keadilan-malah-mentok-di-jalur-kekeluargaan>.
- Margaretha. 2014. *Menjaga Anak-Anak Kita dari Pelecehan Seksual*. Tersedia [daring] <http://psikologiforensik.com/2014/12/17/menjaga-anak-anak-kita-dari-pelecehan-seksual/>.
- Mendelson, T. dan Letourneau, E. J. 2015. Parent-Focused Prevention of Child Sexual Abuse. *Prevention Science*, 16 (6): 844-852.
- Mulyadi, 2018. *Tingkah Laku Menyimpang Remaja dan Permasalahannya*. Jurnal Al-Taujih, 4 (1): 23-32.
- Nadzirah, L. N. (2018). *Peran Keluarga dalam Mengatasi Anak Kecanduan Pornografi*. Skripsi. Malang: UIN Malik Ibrahim.
- Nasution, H. A. (2019). *Patologi Sosial dan Pendidikan Islam Keluarga*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Nevid, J. S. dan Rathus, S. A. (2012). *Abnormal Psychology in a Changing World*. Jakarta: Erlangga.
- Nortajuddin, A. 2020. Sex Predators Thriving in a Pandemic. *The Asean Post*. Tersedia [daring] <https://theaseanpost.com/article/sex-predators-thriving-pandemic>. Diakses 15 Desember 2020.
- Nurbayani, S. 2020. *Correlation of sosio-regional characteristics to women's*

and children's violence distribution in Indonesia. Makalah pada the 4th International Geography Seminar 2020, Bandung 30 September 2020.

- Nurbayani, S., Malihah, E., Komariah, S., dan Utami, L. 2019. *Modul Gerakan Sosial "Peduli Anak Bangsa" Bagi Korban Kekerasan Seksual Pedofilia*. Bandung: FPIPS UPI.
- Parker, K. dan Wang, W. 2013. *Modern Parenthood: Roles of Moms and Dads Converge as They Balance Work and Family*. Washington: Pew Research Center.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 1 Juni 1994. Jakarta.
- Perera, C. 2016. *Hentikan Eksploitasi Seksual Anak dalam Perjalanan dan Pariwisata*. Bangkok: ECPAT Internasional.
- Poloma, M. M. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Quadara, A., Nagy, V., Higgins, D. dan Siegel, N. 2015. Conceptualising the Prevention of Child Sexual Abuse: Final Report. *Research Report No. 33*. Melbourne: Australian Institute of Family Studies.
- Raijaya, I. G. A. A. K. M. dan Sudibia, I. K. 2017. Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Terjadinya Kasus Pelecehan Seksual pada Anak di Kota Denpasar. *Piramida*, 13 (1): 9-17.
- Ramida, E., Salim, I. dan Parijo. 2015. Analisis Faktor Penyebab dan Pengendalian Perilaku Menyimpang Siswa Kelas X Minat Ilmu Pengetahuan Alam. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 4 (9).
- Retno, E. D. dan Sarwono, S. W. 2008. Profil Kepribadian Pria Pedofilia Melalui Tes Rorschach. *Jurnal Psikologi Sosial*, 14 (2).
- Santrock, J. W. 2012. *Adolescence*. New York: McGraw-Hill.
- Saputri, M. 2017. 8 Cara Mencegah Anak Jadi Korban Pelaku Pedofilia. *Tirto.id*. Tersedia [daring] <https://tirto.id/ckXQ>. Diakses 15 Desember 2020.

- Sarwono, S. W. 1997. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Schaefer, R. T. 1989. *Sociology*. New York: McGraw-Hill. Inc.
- Schur, E. M. 1989. *Interpreting Deviance: A Sociological Introduction*. New York: Harper and Row Publishers.
- Seto, M. C. 2008. *Pedophilia and Sexual Offending Against Children (Theory, Assessment, And Intervention)*. Washington: American Psychological Association.
- Setyawan, D. 2014. Indonesia Darurat Kejahatan Seksual. Tersedia [daring] <http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/>. Diakses 15 Desember 2020.
- Siahaan, J. MS. 2010. *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Singh, R. 2010. *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Situmorang, A. W. 2013. *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Smelser N. 1971. *Theory of Collective Behavior*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Sofian, A., Pratama, B. Ramadani, D. dan Banyumurti, I. 2018. *Modul Pelatihan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak Online untuk Organisasi Perlindungan Anak dan Komunitas*. Jakarta: ECPAT Indonesia.
- Sommaliagustina, D. dan Sari, D. C. 2018. Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Psychopolytan*, 1 (2): 76-85.
- Sripah dan Afifah, W. 2017. Alternatif Pemidanaan terhadap Kejahatan Pedofilia Berulang. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 183-208.
- Sukmana, O. 2013. Konvergensi Antara Resource Mobilization Theory dan Identity oriented Theory dalam Studi Gerakan Sosial Baru. *Sosiologi Reflektif*, 8 (1): 39-62.
- Suyato. 2005. Perilaku Menyimpang dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Civics*, 2 (2): 1-7.
- Syarbaini, S. 2013. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

- Tarczon, C. 2012. *Mothers with a History of Childhood Sexual Abuse: Key Issues for Child Protection Practice and Policy (ACSSA Research Summary)*. Melbourne: Australian Institute of Family Studies.
- Theimer, K. dan Hansen, D. J. 2017. Attributions of Blame in a Hypothetical Child Sexual Abuse Case: Roles of Behavior Problems and Frequency of Abuse. *Journal of Interpersonal Violence*, 1-22.
- Toews, K., Cummings, J. A. dan Zagrodney, J. L. 2016. Mother Blame and the Just World Theory in Child Sexual Abuse Cases. *Journal of Interpersonal Violence*, 1-26.
- Viatrie, D. I. 2015. Menilik Perasaan Terancam Bahaya Kejahatan Kriminal. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 3 (1): 121-131.
- Waldram, J. B. 2012. *Hound Pound Narrative (Sexual Offender Habilitation and the Anthropology of Therapeutic Intervention)*. California: University of California Press.
- Walker, A. K. D. dan MacPhee, D. 2011. How Home Gets to School: Parental Control Strategies Predict Children's School Readiness. *Early Childhood Research Quarterly*, 26 (3): 355-364.
- Weber, R. M. dan Smith, D. M. 2010. Outcomes of Child Sexual Abuse as Predictors of Later Sexual Victimization. *Journal of International Violence*, 26 (9): 1899-1905.
- Whitaker, D., Le, B., Hanson, R. K., Baker, C., McMahon, P., Ryan, G., Klein, A. & Rice, D. 2008. Risk Factors for the Perpetration of Child Sexual Abuse: A Review and Meta-Analysis. *Child Abuse and Neglect*, 32: 529-48.
- Wibowo, B. C., Nurhadi dan Subagya, S. 2016. *Analisis Tipologi Adaptasi Robert K. Merton dalam Implementasi Pendekatan Saintifik oleh Guru di SMA Negeri 2 Sukoharjo*. Antologi Tugas Akhir. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.
- Widodo, A. 2020. Penyimpangan Perilaku Sosial Ditinjau dari Teori Kelekatan Bowlby (Studi Kasus Terhadap Anak Tenaga Kerja Wanita di Lombok Barat). *Entita*, 2 (1): 35-50.

- Wirawan, I. B. 2012. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Yogatama, A. 2012. Muatan Pornografi Anak pada Lingkaran Pedofilia di Dunia Maya. *Scriptura*, 3 (2): 188-200.

TENTANG PENULIS

Siti Nurbayani merupakan dosen sekaligus peneliti di Program Studi (Prodi) Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi ditempuh di tempat kelahirannya, yakni Bandung, Jawa Barat. Beliau menyelesaikan jenjang sarjana (S1) di Program Studi PMPKN-IKIP Bandung (sekarang Prodi PKN – Universitas Pendidikan Indonesia) pada tahun 1993. Ketertarikan terhadap isu-isu sosial dibuktikan dari pilihan studi magister (S2) di Program Pascasarjana Sosiologi-Antropologi, Universitas Padjadjaran yang selesai tahun 2004. Langkah ini terus dimantapkan melalui jenjang doktoral (S3) di Program Pascasarjana Pendidikan IPS–Universitas Pendidikan Indonesia yang diselesaikan beliau pada tahun 2014. Selain pendidikan formal, beliau pernah menjalani beragam kursus di bidang politik, pendidikan, serta isu-isu sosial budaya sejak tahun 1997 s.d. sekarang.

Sebagai dosen, beliau mempunyai minat kajian pada bidang gender, penyimpangan dan patologi sosial, serta kearifan lokal. Beliau tercatat sebagai dosen luar biasa di beberapa kampus, seperti STMB Telkom dan STKIP Bandung. Selain melakukan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, beliau saat ini merupakan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan FPIPS UPI. Ketertarikan terhadap kajian pedofilia dapat dilacak dari artikel-artikel beliau, seperti *Pedophilic Sexual Disorders towards children: How Should the Community be Taken Care of?* (Atlantis Press), *Sexual Violence in Adolescent* (Scitepress), dan *Pedophilia and the Lack of Social Control (A Case Study of Sudajaya)* (Atlantis Press). Beliau dapat dihubungi secara daring melalui surat elektronik yang beralamat s.nurbayani@upi.edu.